

PROBLEMATIKA HUKUM YANG TIMBUL BERKAITAN DENGAN WEWENANG DISKRESI OLEH PENYIDIK UNTUK MEMILIH DAN MENENTUKAN "KETERANGAN AHLI" PORNOGRAFI

Oleh :

ISMU GUNADI

ABSTRACT

authority of Diskresi by investigator in choosing and determining expert eyewitness or expert do not be supported clear legal fundament, in practice the straightening of law, role of investigator subyektip in environmental context [of] family, embraced religion and also view having the character of person of especial factor; which is on its its have an effect on to justice decision which frequently exactly disagree with expectation justice of society that is light crime decision that is attempt crime.

keyword : *Diskresi, pornography / pornoaksi, expert boldness.*

PENDAHULUAN

Pornografi serta Pornoaksi dalam konteks keIndonesiaan sangat erat kaitannya serta tidak dapat dipisahkan dengan nilai moral dan agama. Disisi lain jika dilihat dalam perspektif Negara sekuler maka persoalan pornografi dan pornoaksi tidak ada keterkaitan dengan persoalan moralitas yang bersendikan agama; hal ini sejalan dengan paham positivisme (aliran hukum murni) yang intinya memisahkan secara tegas antara hukum dengan moral.

Sementara itu dalam perspektif hukum yang berlaku di Negara kesatuan Indonesia yang bersendikan dan

berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa nampak jelas bahwa peran Negara dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya tidaklah dapat dipisahkan dari nilai nilai moralitas yang bersendikan agama. Tetapi ada yang perlu digaris bawahi adalah konsepsi bahwa Indonesia bukan pula Negara Agama.

Dengan demikian maka yang menjadi persoalan adalah nilai nilai ideal yang dibingkai hukum positif dalam tataran praktek penerapannya mem-butuhkan manajemen operasional hukum yang terikat oleh prosedur tetap (Hukum Acara) serta tidak dapat dipisahkan dari peran para pelaksana hukum itu sendiri; Selanjutnya nilai nilai ideal hukum